

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ofensif realisme menitikberatkan pentingnya kapabilitas militer dan proyeksi kekuatan bagi sebuah negara. Menilik pada tahun-tahun sebelumnya, Tiongkok telah menunjukkan ambisi untuk memperluas pengaruhnya melalui berbagai inisiatif ekonomi serta politik yang luas. Salah satu inisiatif utama yang mencerminkan ambisi ini di Kawasan Asia Selatan adalah Proyek *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC). CPEC yang meliputi proyek infrastruktur dimana beberapa proyek dibawah payung CPEC sangat berpotensi digunakan untuk tujuan militer. Potensi tersebut memberikan dukungan pada kemampuan Tiongkok untuk memproyeksikan kekuatannya di luar batas negaranya, memperluas pengaruh regionalnya.

Proyek kerjasama yang terjadi antara Tiongkok dan Pakistan merupakan bagian dari inisiatif yang lebih besar yang juga dikenal dengan nama *Belt and Road Initiative* (BRI) yang dicanangkan oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 2013 (CPEC, 2021). CPEC memiliki tujuan untuk mengembangkan koridor ekonomi yang mampu menghubungkan Tiongkok dengan Pakistan, melalui pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan raya, jaringan kereta api, dan pembangkit listrik. Hal tersebut tidak lepas dari perhatian global yang berasumsi bahwa CPEC merupakan alat yang digunakan oleh Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya di Kawasan Asia Selatan.

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang pesat serta meluasnya pengaruh global Tiongkok membutuhkan pengamanan *line of communication* (LOC) untuk jalur pasokan sumber daya, perdagangan, dan energinya. CPEC menyediakan rute yang aman serta efisien untuk proses impor energi dari negara-negara Timur Tengah, dan berkontribusi terhadap perkembangan keamanan suplai energinya. Selain itu CPEC juga memberikan Tiongkok keuntungan strategis di kawasan Asia Selatan dengan menguatnya pengaruh ekonomi serta politik Tiongkok di Pakistan dan area sekitarnya. Keunggulan pengaruh tersebut mampu menyaingi pengaruh India di Kawasan Asia Selatan, serta berpotensi untuk menciptakan kondisi *balance of power* yang menguntungkan bagi Tiongkok. CPEC juga membantu Tiongkok mengontrol titik strategis Selat Malaka, yang memiliki potensi kerentanan dimana perdagangan maritim Tiongkok rentan diganggu oleh negara-negara pesaing.

Rute CPEC, termasuk pelabuhan Gwadar di Provinsi Balochistan, Pakistan memiliki kepentingan strategis yang signifikan. Ofensif Realisme percaya bahwa melalui pembangunan rute perdagangan tersebut, Tiongkok tidak hanya tertarik untuk memfasilitasi perdagangan namun juga untuk menunjukan atau membentuk kehadirannya di Kawasan Asia Selatan yang memiliki jalur transit maritim dan energi yang sangat penting. Hal tersebut memperbolehkan Tiongkok untuk mempengaruhi dan bahkan berpotensi untuk mengambil kontrol atas titik-titik penting dan jalur laut, sehingga berdampak pada kepentingan ekonomi serta keamanan negara lain yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut.

Investasi Tiongkok dalam proyek CPEC di Pakistan juga dapat dilihat sebagai bentuk *counterbalance* atau penyeimbang India yang merupakan rival

regional. Dengan mengembangkan kedekatan ekonomi dan hubungan strategis dengan Pakistan, Tiongkok tidak hanya mendapat sekutu regional yang kuat namun mampu mengimbangi pengaruh India di Kawasan Asia Selatan. Proyek ini juga mampu membantu Tiongkok untuk mengembangkan pengaruh ekonomi serta politiknya di Wilayah Samudra Hindia, mempertontonkan statusnya sebagai *the raising great power*. Dalam perspektif realisme ofensif, *great power* memprioritaskan keamanan kepentingan ekonominya. Dengan melakukan investasi di bidang infrastruktur dan pengembangan ekonomi melalui CPEC, Tiongkok mampu mengamankan asset ekonominya di Pakistan dan memastikan stabilitas investasinya.

Hubungan Tiongkok dan Pakistan dilatarbelakangi oleh dinamika geostrategi dan geopolitik kawasan yang kompleks. Hubungan kemitraan prospektif tersebut—*all-weather friendship* dan *all-round cooperation*—dilihat oleh India dan Amerika Serikat (selaku sekutu India) sebagai sebuah ancaman bagi dominasi kedua negara tersebut di kawasan Asia Selatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan keputusan Amerika Serikat memberikan label “*unfortunate violation of free world solidarity*” kepada Pakistan yang pada akhirnya menyebabkan penundaan pinjaman sebesar US\$4,3 juta oleh Amerika Serikat yang pada saat itu sangat dibutuhkan oleh Pakistan untuk memodernisasi bandara Dhaka Zhou Enlai (Pakistan-China Institute, 2018).

Merujuk pada perang India-Pakistan pada tahun 1965 dan 1971, bantuan ekonomi serta militer Tiongkok merupakan komponen krusial bagi sektor pertahanan Pakistan. di periode yang sama, terjadinya pertemuan rahasia antara

Tiongkok dan AS pada awal 1970-an—dimana peran Presiden Nixon dan Menteri Luar Negeri Henry Kissinger sangat membantu dalam proses normalisasi hubungan Tiongkok dan AS—India dan Uni Soviet berkoalisi sebagai respon tanggap terbentuknya segitiga strategis Tiongkok-AS-Pakistan. Terbentuknya koalisi India dan Uni Soviet merupakan sebuah katalis bagi hubungan antara Tiongkok dan Pakistan yang keluar dengan kedekatan yang lebih erat dari sebelumnya.

Karakoram Highway (KKH) yang mulai dibangun pada tahun 1959 dan berakhir di tahun 1978 merupakan gerbang bagi hubungan ekonomi dan politik Tiongkok dan Pakistan. di bidang militer, mengikuti ditandatanganinya perjanjian kerjasama nuklir komprehensif antara Tiongkok dan Amerika Serikat pada tahun 1986, Tiongkok juga mengirimkan berbagai produk dan layanan nuklir ke Pakistan (dukungan teknis dan penelitian pengayaan uranium, serta reaktor tenaga nuklir). Invasi Uni Soviet ke Afghanistan pada tahun 1979 hingga 1989 yang mengancam stabilitas regional dan perdamaian Kawasan Asia Selatan menuntut Tiongkok untuk mengirimkan pasokan militer senilai \$200 juta/tahun kepada Pakistan sebagai bentuk keseriusan Tiongkok dalam mendukung Pakistan selama periode konflik tersebut berlangsung. Tiongkok juga mengirimkan bantuan berupa program rudal balistik kepada Pakistan yang mana hal tersebut membantu kekuatan strategis Pakistan di Kawasan Asia Selatan (Khan, 2015).

Hubungan baik antara Tiongkok dan Pakistan merupakan jembatan bagi Tiongkok untuk memperbesar pengaruhnya di Kawasan Asia Selatan. Banyaknya kerjasama yang dilakukan oleh Tiongkok dan Pakistan tidak hanya mempererat hubungan antar kedua negara, melainkan Tiongkok dan Pakistan juga diuntungkan

dengan keberhasilan proyek-proyek tersebut. Sebagai negara ambisius (berambisi untuk menjadi negara poros perekonomian dunia) Tiongkok sangat memperhitungkan keamanan, stabilitas, perdamaian, dan pembangunan Kawasan Asia Selatan sebagai syarat kelancaran proyek Tiongkok di Asia Selatan yang mampu membantu Tiongkok mencapai ambisinya sebagai negara poros perekonomian di Kawasan Asia Selatan.

Pada awal abad ke-21, hubungan Tiongkok-Pakistan dibingkai dalam kerangka kemitraan dan kerjasama komprehensif. Meskipun Amerika Serikat merupakan pasar ekspor terbesar Pakistan, namun secara keseluruhan Tiongkok memenangkan posisi sebagai mitra dagang bilateral terbesar dan merupakan sumber arus masuk investasi asing langsung terbesar serta kreditor utama bagi Pakistan. Salah satu bentuk keterlibatan Tiongkok di Pakistan dapat dilihat melalui kebijakan CPEC, yang menaungi proyek-proyek pembangunan seperti pembangunan sektor energi, transportasi (jalan raya, pelabuhan, pangkalan udara), ekonomi, dan pertukaran sosial dan budaya (*Ministry of Foreign Affairs, 2021*). Sebagai sebuah proyek kerjasama dengan nilai investasi yang sangat besar, CPEC menopang harapan bagi peningkatan perekonomian Pakistan dan Kawasan Asia Selatan.

Dibantu dengan pesatnya perkembangan proyek CPEC, pada tahun 2030 Pakistan diperkirakan dapat masuk kedalam jajaran 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia (CPIC Global, 2022). CPEC dinilai mampu membukakan 2,3 juta lapangan kerja baru bagi penduduk Pakistan. Dengan pengembangan jaringan transportasi modern, proyek pembangunan sektor energi, pembentukan Zona Ekonomi Spesial, CPEC akan secara masif mendongkrak perekonomian Pakistan

ke tingkat yang lebih tinggi. Peningkatan ekonomi Pakistan juga diiringi dengan membengkaknya hutang Pakistan terhadap Tiongkok. Hal tersebut di verifikasi oleh pernyataan perdana menteri Pakistan Imran Khan dalam pernyataannya mengenai alasan dibalik banyaknya hutang Pakistan terhadap Tiongkok yang juga merupakan bentuk kepercayaan Pakistan terhadap investor terbesarnya (Hawkins, 2023).

Pada titik ini, timbul pertanyaan terkait perkembangan proyek CPEC yang sejalan dengan strategi Tiongkok dalam membentuk dan memperluas *sphere of influence*-nya di Kawasan Asia Selatan. Istilah *sphere of influence* mengacu pada konsep yang menghubungkan antara negara-negara atau kekuatan besar dengan pengaruh dominan yang dibawa di bidang ekonomi, politik, dan keamanan di wilayah tertentu. Investasi masif yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap CPEC di Pakistan, Kawasan Asia Selatan menimbulkan kekhawatiran akan dampak yang dibawa oleh keberhasilan proyek tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada analisis perkembangan CPEC dan bagaimana dampak yang dibawa oleh proyek ini mampu membantu Tiongkok dalam pembentukan serta perluasan *sphere of influence*-nya di Kawasan Asia Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan utama: “Bagaimana CPEC mampu membantu Tiongkok dalam upaya perluasan *Sphere of Influence*-nya di Kawasan Asia Selatan?”/ “Apakah Tiongkok berupaya memperluas *sphere of influence*-nya di Kawasan Asia Selatan melalui CPEC?”/ “Bagaimana kontribusi CPEC dalam perluasan *sphere of influence* Tiongkok di Kawasan Asia Selatan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Mengetahui upaya perluasan *Sphere of Influence* Tiongkok di Kawasan Asia Selatan.
2. Membuktikan bahwa *China Pakistan Economic Corridor* mampu memperkuat posisi Tiongkok di Kawasan Asia Selatan dalam prosesnya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yang bisa diambil, yaitu:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai ambisi Tiongkok dalam memperluas pengaruhnya di Kawasan Asia Selatan, serta dampak strategis dari proyek CPEC terhadap dinamika regional dan hubungan antara Tiongkok dengan negara-negara lain di kawasan tersebut. Penelitian ini juga berpotensi memberikan wawasan yang bernilai bagi kebijakan luar negeri dan strategi nasional negara-negara terkait dalam menghadapi dampak dari pengaruh Tiongkok di sekitar mereka.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi penting dalam mengkaji dinamika hubungan internasional kontemporer, terutama dalam hal strategi dan pengaruh Tiongkok di Kawasan Asia Selatan.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai kerjasama CPEC yang terjalin antara Tiongkok dan Pakistan. Salah satunya adalah penelitian oleh Mohammed Ahmed Qadri dan Suwaibah Qadri yang melihat hubungan kerjasama CPEC antara Tiongkok dan Pakistan merupakan sebuah balasan terhadap India yang memiliki peran politik sebagai pendukung dan rekan dagang Amerika di kawasan Asia Selatan (Qadri & Qadri, 2019). Penelitian berikutnya membahas mengenai kerjasama Tiongkok dan Pakistan datang dari Sakinah Sulaiman. Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang tersebut meneliti perihal tujuan dibalik kerjasama pelabuhan Gwadar yang dilakukan oleh Tiongkok dan Pakistan. Dalam penelitian ini Sakinah berargumen bahwa kerjasama pelabuhan Gwadar dilakukan demi mencapai tujuan ekonomi dan politik Tiongkok di Kawasan Asia Selatan (Sulaiman, 2017). Penelitian berikut yang dilakukan oleh Sulkha Ashish membawa argumen mengenai hubungan Tiongkok dan Pakistan yang terjadi atas basis persaingan pengaruhnya di Kawasan Asia Selatan dengan India (Sulkha, 2011). Merujuk pada ketiga penelitian diatas, penelitian ini akan membawakan pengamatan yang berbeda mengenai hubungan kerjasama yang dilakukan Tiongkok-Pakistan melalui CPEC dimana Tiongkok disinyalir memiliki tujuan untuk memperluas pengaruhnya di Kawasan Asia Selatan.

Penelitian ini akan melihat peristiwa kerjasama CPEC melalui kacamata *offensive realism* dengan keyakinan bahwa kerjasama tersebut merupakan salah satu bentuk strategi Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya di Kawasan Asia Selatan. Kerjasama CPEC merupakan sebuah proyek ambisius yang dicanangkan

oleh Tiongkok demi membantu peningkatan *power* atau pengaruh Tiongkok di Kawasan Asia Selatan. Hal tersebut dilakukan agar Tiongkok mampu meraih predikat sebagai regional hegemon dimana keamanan serta keberlangsungan kedaulatannya mampu terjaga.

1.5.1 *Offensive Realism*

Secara umum, realisme berdiri di atas 3 poin utama. Poin pertama, realisme memandang bahwa aktor utama dalam politik internasional adalah negara. Poin tersebut merupakan salah satu dari sedikit persamaan yang dimiliki oleh liberalisme dan realisme. Kedua, realisme percaya bahwa perilaku negara (terutama *great powers*) sepenuhnya dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan bukan oleh karakteristik internalnya. Terletak di tengah struktur internasional yang anarki, negara dituntut untuk terus menyesuaikan kebijakan luar negerinya dengan kondisi lingkungan internasional yang sedang berlangsung di sekitarnya. Ketiga, realisme yakin bahwa perhitungan akan kapasitas *power* mendominasi pengambilan keputusan sebuah negara, dan negara saling berkompetisi satu sama lain dalam hal perbesaran *power*-nya masing-masing. Mengutip dari Carl Von Clausewitz, seorang strategis militer ternama di abad ke-19, perang merupakan sebuah perpanjangan dari politik yang memiliki maksud dan tujuan lain (Clausewitz, 1976).

Mengkritik klaim liberalisme, baik Carr maupun Waltz—yang keduanya merupakan raksasa realis dalam studi hubungan internasional—melihat bahwa ketergantungan ekonomi antar negara yang mampu menciptakan kedamaian dunia merupakan suatu ide utopia yang pada akhirnya akan menuntun negara menuju

kehancuran (Lieberman, 1996). Teori liberal percaya bahwa kedamaian dapat diraih melalui pertimbangan atau proses negosiasi yang sehat, dan cenderung berharap pada prospek pembentukan suatu tatanan dunia yang aman dan damai (Norman M. Naimark, 1955). Pada poin sistem internasional dan alasan dibalik kebutuhan *power* sebuah negara, kedua pakar tersebut memiliki pendapat yang sangat bertentangan.

Realisme ofensif '*Offensive Realism*' sendiri merupakan sebuah teori politik internasional gagasan John J. Mearsheimer, yang pesimis akan ide bahwa lingkungan internasional yang damai merupakan hasil dari hubungan baik yang terjalin antar negara. Kondisi internasional yang anarki, menempatkan negara di dalam sebuah perlombaan perbesaran pengaruh '*power*' antara satu negara dengan yang lainnya. Negara *great powers* akan selalu berupaya untuk meningkatkan *power*-nya melalui pengorbanan negara lainnya. Menurut Mearsheimer sikap pesimis ini adalah hasil dari sistem internasional multipolar—dimana didalamnya berisi negara dengan tingkat dominasi tinggi serta negara yang berpotensi untuk menjadi hegemon—yang sangat rentan untuk menimbulkan pertikaian (Ikenberry & Mearsheimer, 2001).

Teori realisme ofensif sangat berfokus pada pergerakan *great powers*. Negara-negara dengan pengaruh yang lebih unggul dibanding negara lainnya disinyalir memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi jalannya politik internasional. Sebagai contoh, politik dalam negeri seluruh negara di dunia sangat terdampak oleh persaingan antara US dan Uni Soviet pada ta.hun 1945 dan 1950 silam. Dua peristiwa perang dunia serta perang dingin juga memiliki dampak yang setara bagi politik dalam negeri di seluruh penjuru dunia. Berkaca dari konflik tersebut,

menurut realisme ofensif dapat disimpulkan bahwa persaingan antara dua atau lebih *great powers* mampu mempengaruhi kondisi politik internasional (Ikenberry & Mearsheimer, 2001).

Tantangan utama bagi sebuah teori hubungan internasional adalah sebaik dan seakurat apakah sebuah teori dalam menjelaskan peristiwa yang terjadi di dunia nyata. Untuk menjawab tantangan tersebut, realisme ofensif berupaya untuk menelusuri perilaku *great powers* dalam kiprahnya di lingkup internasional melalui penjelasan yang ditarik dari sejarah politik *great power* di masa lampau. Teori ini memiliki keunggulan dalam menjelaskan hubungan antara *great powers*, dimana dalam bukunya "*Tragedy of Great Power Politics*" Mearsheimer mampu menggunakan teori ini untuk menjelaskan hubungan antar *great powers* yang berlangsung dari awal era revolusi Perancis dan Perang Napoleonik yang berlangsung dari tahun 1792 hingga akhir abad ke-20. Selain itu Mearsheimer juga mampu mengoperasikan teori ini untuk memprediksi politik *great powers* yang akan terjadi di abad ke-21.

Realisme ofensif memiliki asumsi bahwa sikap suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem internasional yang berlangsung di sekitarnya. Faktor-faktor struktural seperti anarki dan distribusi *power* adalah dua poin utama yang digunakan dalam menjelaskan laju politik internasional. Teori ini sedikit mempertimbangkan faktor individual dan politik dalam negeri suatu negara (ideologi) (Ikenberry & Mearsheimer, 2001). Fokus utama dari penggunaan teori ini adalah mengetahui seberapa besar *power* yang dimiliki oleh sebuah negara dan dampaknya terhadap laju politik internasional dalam jangka waktu tertentu.

Realisme ofensif juga memiliki sifat deskriptif, yang kapabel dalam menjelaskan bagaimana perilaku *great powers* di masa lalu dan mampu memberikan gambaran atas perilaku *great powers* di masa yang akan datang.

Realisme ofensif juga memiliki sifat preskriptif, yang menganjurkan negara untuk bertingkah laku sebagaimana teori ini cantumkan. Klaim tersebut didasari oleh kepercayaan bahwa anjuran teori ini, tentang bagaimana negara harus bersikap, merupakan opsi yang paling realistis dalam memastikan keberlangsungan suatu negara di tengah dunia yang “berbahaya”. Bagi seorang realis, perhitungan akan *power* bergantung pada pandangan sebuah negara terhadap dunia di sekitarnya. *Power* merupakan mata uang dalam politik *great powers*, dan negara akan selalu bersaing satu dengan yang lainnya dalam meningkatkan *power*-nya masing-masing. Klaim tersebut muncul, akibat dari negara yang berada dalam sistem internasional akan selalu berupaya untuk mencapai titik amannya masing-masing.

Offensive realism menawarkan jawaban atas dua pertanyaan seputar politik internasional. Pertama, mengapa *great powers* sangat mengincar *power*? dan logika dasar apa yang mampu menjelaskan alasan dibalik persaingan *power* tersebut? serta pertanyaan kedua, seberapa besar *power* yang diincar dan dibutuhkan oleh negara agar tiba pada fase “cukup”? Dengan dibantu oleh indikator pendeteksi *power* yang baik, pekerjaan untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut dapat dilakukan dengan jauh lebih mudah. Berpegang pada pengetahuan akan kapasitas *power* sebuah negara, peneliti mampu membuka untuk mendeskripsikan fondasi sistem internasional secara menyeluruh. Lebih spesifik, negara dengan kualifikasi sebagai

great powers dengan sendirinya akan teridentifikasi (Ikenberry & Mearsheimer, 2001).

Berangkat dari pandangan singkat mengenai teori ini, *Offensive Realism* Mearsheimer berdiri dengan 5 asumsi dasar mengenai cara pandangya terhadap lingkungan internasional. Kelima asumsi dasar tersebut antara lain:

1. Dunia berjalan dalam anarki, dimana dunia tidak memiliki sistem hierarki superior yang mampu menjamin keamanan suatu negara. Disini Mearsheimer memandang bahwa aktor utama dari peristiwa yang terjadi dalam lingkungan internasional adalah negara.
2. Semua negara yang berada dalam lingkungan internasional memiliki kapasitas militernya masing-masing. Asumsi ini menunjukkan dengan jelas perbedaan kapabilitas militer antara negara satu dengan yang lainnya dimana negara yang memiliki kapasitas militer terbesar cenderung memiliki dominasi atas negara-negara lain dengan kapasitas militer yang lebih kecil. Mearsheimer juga melihat bahwa kekuatan militer ini merupakan salah satu upaya suatu negara untuk melindungi kedaulatan negaranya dari ancaman yang bersifat internal maupun eksternal.
3. Aktor negara tidak akan dapat mengetahui intensi sesungguhnya dibalik perilaku aktor negara lainnya. Meskipun pernyataan terkait perilaku tersebut sudah diutarakan, aktor-aktor negara masih akan tetap ditinggalkan bertanya terhadap kemungkinan adanya agenda lain dibalik perilaku negara tersebut. Sebagai pertimbangan, Mearsheimer berargumen bahwa negara tidak akan

dapat memastikan kapan negara lain akan menggunakan kekuatan ofensif militernya.

4. Prioritas utama sebuah negara dalam kiprahnya di lingkungan internasional adalah untuk memastikan keberlangsungan kedaulatan negaranya masing-masing atau “*survival*” (integritas teritorial dan otonomi domestik). Kepentingan kenegaraan lainnya akan menjadi tidak berarti bila suatu negara dihadapkan dengan situasi dimana kedaulatan negaranya terancam.
5. Negara merupakan aktor rasional. Mearsheimer berargumen bahwa sebuah negara akan selalu mempertimbangkan konsekuensi jangka pendek maupun panjang yang dapat ditimbulkan oleh perilakunya di lingkungan internasional. Dengan adanya pertimbangan tersebut, aktor negara akan secara rasional memikirkan langkah strategis demi menjamin keberlangsungan kedaulatan negaranya masing-masing.

Realisme ofensif menawarkan jawaban terhadap pertanyaan “strategi seperti apa yang dimiliki oleh negara untuk mendapatkan *power* atau mempertahankan *power* yang dimiliki, dikala terdapat *great powers* lain yang mengancam *balance of power*?”, realisme ofensif menawarkan solusi atas dua skenario tersebut. Diantaranya adalah melalui sistem pemerasan ‘*blackmail*’ serta perang, dimana negara mampu mendapatkan *power*, dan dengan strategi *balancing* serta *buck-passing*-lah *great power* dapat mempertahankan distribusi *power* saat menghadapi lawan yang seimbang atau cenderung berbahaya. Dengan *balancing*, negara yang terancam dituntut untuk memikul beban yang sama serta memberikan sumber daya yang substansial agar tujuannya tercapai. *Buck-passing*, *great powers*

yang terancam akan menarik negara lain untuk memikul beban dari upaya pencegahan maupun mengalahkan negara yang mengancam dominasinya (Ikenberry & Mearsheimer, 2001).

Tabel 1.1 *The Major Realist Theories*

	Human Nature Realism	Defensive Realism	Offensive Realism
What causes states to compete for power?	Lust for power inherent in states	Structure of the system	Structure of the system
How much power do states want?	All they can get. States maximize relative power. With hegemony as their ultimate goal.	Not much more than what they have. States concentrate on maintaining the balance of power	All they can get. States maximize relative power. With hegemony as their ultimate goal.

Sumber: *Tregedy of Great Power Politics*

Offensive realism Mearsheimer merupakan sebuah teori politik internasional yang bersifat struktural. Sama seperti teori *defensive realism* Kenneth Waltz, *offensive realism* melihat bahwa fokus utama bagi *great powers* adalah mencari cara untuk mempertahankan keamanan dan kedaulatannya di dunia yang tidak memiliki otoritas tertinggi yang mampu melindungi negara dari ancaman negara lainnya; mereka sama-sama menyadari bahwa *power* merupakan kunci untuk “*survival*”. Perbedaan antara kedua teori ini terletak pada pemahaman akan kebutuhan *power* yang diperlukan oleh negara.

Defensive realism menganggap bahwa struktur internasional tidak mengharuskan negara untuk mengejar perbesaran *power*, melainkan mendorong negara untuk mempertahankan keseimbangan *power* yang sudah ada. di sisi yang

lain, *offensive realism* percaya bahwa *status quo* jarang dijumpai dalam politik dunia. Hal ini dikarenakan sistem internasional telah menciptakan keharusan bagi negara untuk mencari kesempatan dalam mendapatkan *power* melalui negara rivalnya, dan untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut dimana keuntungan lebih besar dibanding pengeluaran yang harus dikeluarkan.

Offensive realism dan *human nature realism* sama-sama menggambarkan negara tidak mengenal kata lelah dalam upaya perbesaran *power*. Perbedaan utama yang dapat dilihat dari kedua teori ini terletak pada alasan bagi negara dalam upaya perbesaran *power*-nya. Morgenthau dan *human nature realism* memandang bahwa upaya maksimalisasi *power* sebuah negara dipengaruhi oleh sistem internasional yang ada. Dengan kata lain, keberlangsungan sebuah negara menuntut negara agar bersifat agresif. Singkatnya, sifat agresif *Great Power* bukan berasal dari keinginan atau dorongan dari dalam negaranya untuk mendominasi, namun tuntutan dimana negara harus memperbesar *power* masing-masing bila ingin memaksimalkan kemungkinan keberlangsungan negara tersebut.

1.6 Argumen Penelitian

Argumen penelitian ini adalah: Tiongkok mempergunakan *China Pakistan Economic Corridor* atau CPEC sebagai instrumen perluasan *sphere of influence*-nya di Kawasan Asia Selatan, dimana proyek ini memberikan kontribusi secara langsung pada penguatan bidang ekonomi dan kehadiran militer Tiongkok di kawasan tersebut. Oleh karena itu, CPEC dapat dikatakan sebagai alat bagi Tiongkok dalam memperluas *Sphere of Influence*-nya di Kawasan Asia Selatan melalui penguatan ekonomi, infrastruktur, politik dan keamanan.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan penalaran empiris untuk kemudian keluar dengan kesimpulan yang dapat mendukung argumen utama penelitian. Kualitatif dipilih karena dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat lebih berfokus menelusuri cara dunia sosial bekerja dan alasan yang ada di balik fenomena-fenomena yang ada di lingkungan internasional (Levy, 2009). Metode kualitatif juga dapat membantu peneliti untuk menekankan proses serta implikasi dari peristiwa yang diteliti secara mendalam (Gunawan, 2013). Didalam penelitian ini, pemeliti akan meninjau data dari sumber yang berbeda serta membangun diskusi naratif guna menjawab pertanyaan yang menjadi subjek utama penelitian ini. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti diharapkan dapat menganalisis secara komperhensif mengenai peran CPEC dalam perbesaran lingkup pengaruh '*Sphere of Influence*' di bidang ekonomi, politik, serta keamanan Tiongkok di Kawasan Asia Selatan.

1.8 Definisi

1.8.1 Great Power

Dalam studi hubungan internasional, istilah *great power* digunakan untuk merujuk negara yang memiliki kapabilitas serta kemampuan untuk menggunakan pengaruhnya di ranah internasional. Karakteristik sebuah *great power* ditunjukkan oleh kapabilitas ekonomi dan militer yang dimiliki oleh sebuah negara, serta pengaruh diplomatik dan *soft power* negara tersebut, yang mengakibatkan negara *middle* atau *small power* mempertimbangkan opini dari *great power* sebelum

berperilaku. Teori hubungan internasional mengkategorikan karakteristik *great power* menjadi *power capabilities*, *spatial capabilities*, dan *status dimensions* (Ikenberry & Mearsheimer, 2001). *Power* menurut Mearsheimer didefinisikan sebagai sebuah bentuk kemampuan material sebuah negara. *Power* dibagi menjadi dua bentuk yaitu, *latent power* dan *military power*. *Latent Power* diartikan sebagai sumber *power* yang mampu membantu pencapaian serta pembentukan kemampuan militer seperti nasionalisme, sumber daya (manusia & alam), ekonomi serta populasi yang kerap merujuk pada atribut negara. *Military Power* dibentuk berdasarkan kemampuan militer darat sebagai ujung tombak kekuatan, dan kekuatan militer bidang lainnya sebagai kekuatan pelengkap. Mearsheimer berargumen bahwa guna mendapatkan pemahaman mengenai distribusi kekuatan di dalam suatu kawasan, dimensi *power* merupakan elemen terbaik yang dapat digunakan sebagai acuan. Mengacu pada gambaran sebelumnya, pola hubungan yang terbentuk dalam bipolar (dimana hanya terdapat dua *great power* dalam satu kawasan) memastikan bahwa keunggulan *power* relatif (ekonomi dan militer) yang dimiliki oleh *great power* tersebut merupakan inti dari tercapainya status sebagai *great power* (Ikenberry & Mearsheimer, 2001).

1.8.2 Sphere of Influence

Sphere of Influence merupakan suatu bentuk wilayah khusus yang dimiliki oleh sebuah negara atau organisasi dengan keunggulan budaya, ekonomi, militer, serta politik dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada dalam wilayah yang sama. Keunggulan yang dimiliki oleh negara tersebut dapat digunakan untuk

menyebarkan nilai-nilai kekuasaan yang dimiliki kepada negara-negara dengan keunggulan yang lebih sedikit dalam suatu kawasan (Hast, 2014).

1.9 Definisi Operasional

1.9.1 Great Power

Kebangkitan Tiongkok menjadi sebuah fenomena yang mendunia. Penggunaan konsep *great power* memiliki tujuan untuk menggambarkan kondisi Tiongkok yang telah mencapai status tersebut seiring dengan meningkatnya kapabilitas ekonomi, militer, serta politiknya. Perilaku yang ditunjukkan oleh Tiongkok di kawasan Asia Selatan disinyalir merupakan sebuah ajang pertunjukan kekuatan Tiongkok sebagai sebuah *great power*, dimana Tiongkok mampu mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri negara-negara di kawasan Asia Selatan.

1.9.2 Sphere of Influence

Sphere of Influence merupakan suatu bentuk lingkup yang merepresentasikan pengaruh yang dibawa oleh sebuah negara di lingkungan internasional sekitarnya. *Sphere of Influence* melingkupi pengaruh suatu negara di setiap aspek kenegaraan seperti aspek media, akademik, ekonomi, sosial, militer, keamanan, teknologi, politik dalam negeri, dan kebijakan luar negeri. Konsep *Sphere of Influence* juga menjelaskan mengenai peran serta hak istimewa dari negara dengan pengaruh terbesar di wilayah lingkungannya. *Sphere of Influence* diklasifikasikan sebagai hasil dari keberhasilan upaya-upaya sebuah negara dalam membesarkan pengaruhnya di suatu wilayah. Salah satu bentuknya adalah

dominannya pengaruh Tiongkok dalam aspek akademik, ekonomi, militer, teknologi, serta kebijakan luar negerinya di Pakistan.

Secara umum *Sphere of influence* mengedepankan hubungan antara daerah territorial dan politik sebagai bagian dari tradisi Geopolitik sebagai inti dari upaya pembelajaran *Sphere of Influence*. Geopolitik yang berbentuk motivasi politik merupakan sebuah alat pencapaian *power*. Tindakan yang dilakukan oleh sebuah negara merupakan bentuk komunikasi yang digunakan untuk mendesak atau memberikan dukungan terhadap perilaku aktor negara lain yang bersangkutan. Tindakan juga dapat diartikan sebagai isyarat yang dikirimkan, guna mempengaruhi pandangan penerima pesan terhadap maksud yang dimiliki oleh pengirim pesan. Dengan kata lain, politik luar negeri selalu berkaitan dengan kepentingan nasional. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dalam konstelasi politik internasional, politik jenis ini kerap diimplementasikan (Nurdiana, 2018).

1.10 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatif. Tipe ini dipilih karena penelitian ini akan menjelaskan hubungan sebab akibat dari fenomena yang menjadi objek penelitian ini. Sehingga, diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan sebuah analisis secara komprehensif mengenai pemanfaatan CPEC oleh Tiongkok sebagai alat pembentukan *Sphere of Influence*-nya di Pakistan.

1.11 Metodologi Pengumpulan Data

Metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan studi Pustaka. Studi Pustaka digunakan untuk mendapatkan

data-data yang terkait dengan penelitian dari sumber-sumber yang kredibel. Peneliti akan mengumpulkan data-data dari sumber-sumber yang kredibel seperti buku, jurnal, berita, situs-situs internet kredibel, laporan-laporan terdahulu, majalah-majalah yang bersifat documenter, video konferensi dengan topik yang terkait, serta literatur-literatur lain yang kemudian digunakan untuk membangun argument utama guna menjawab rumusan masalah.

1.12 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Process-tracing* atau penelusuran proses. Metode analisis ini akan menelusuri mekanisme rangkaian sebab-akibat yang ditimbulkan oleh subjek penelitian, berdasarkan proses analisis yang dilakukan secara empiris dan menyeluruh. Dalam proses analisis menggunakan metode penelusuran proses terdapat dua komponen utama yaitu: (1) mekanisme penelusuran yang memiliki dasar teoritis, dan (2) evaluasi terhadap kesimpulan akibat/kausalitas materi penelitian empiris yang dilakukan secara transparan serta didukung dengan pelaksanaan penilaian kepastian serta keunikan dari masing-masing komponen dalam proses pengamatan. Proses analisis ini juga akan dibantu dengan bukti komparatif lintas kasus sebagai komponen tambahan dari metode analisis penelusuran proses, yang dapat digunakan bilamana butuh mencantumkan studi kasus lain sebagai bahan pembandingan dengan studi kasus utama. Komponen tambahan ini dapat digunakan untuk mencari persamaan antara kasus utama dengan kasus yang sudah pernah terjadi di lain peristiwa (Beach, 2020).